

PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI MANJEMEN DATABASE JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP) BAPPENAS

Maniah
Universitas Widyatama Bandung
maniah.8829@widyatama.ac.id

Abstrak

Berdasarkan pada **Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya**, Bappenas telah ditetapkan sebagai **Instansi Pembina Perencana**. Sebagai **Instansi Pembina Perencana**, Pusbindiklatren-Bappenas harus melakukan pelayanan, melalui penyediaan data-data dan informasi yang diperlukan oleh **Institusi Perencanaan**, para perencana dan Kepala unit kerja lain yang melakukan kerjasama dengan Pusbindiklatren-Bappenas. Bentuk layanan tersebut harus diwujudkan dalam suatu bentuk produk yang bisa dirasakan oleh semua pihak yang dan pihak manajemen Pusbindiklatren-Bappenas berinisiatif mencari solusi sebagai upaya memberikan layanan yang terbaik. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan membangun sebuah **Sistem informasi Manajemen Jabatan Fungsional Perencana [SIM-JFP] Bappenas berbasis web**. Aplikasi yang dibangun berbasis web yang dirancang dengan *platform open source* dengan berbagai tingkatan akses user sesuai dengan kewenangannya, yaitu : administrator, operator dan user pengguna lainnya yang dapat dijalankan pada platform OS Windows server XP, Vista atau Linux, Database RDBMS dan script pemrograman yang berorientasi object, sehingga mampu menangani dan mengelola data yang besar dan image serta dibangun dengan pendekatan metodologi "*Software Engineering*" yang baik. Untuk mendapatkan sebuah aplikasi yang memenuhi kriteria tersebut, perlu dibuat sebuah roadmap yang mencakup proses analisis, perancangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem, secara ideal dari segi teknis dan ekonomis atau lebih dikenal dengan sebutan *techno-economy* yang dituangkan dalam sebuah *perancangan SIM JFP*. Metode yang akan digunakan dalam pengerjaan penelitian ini meliputi *Persiapan, Survey dan Analisis, Desain, Coding, Testing, Training, Operasional*. Manfaat dari penelitian ini adalah tersedianya data/informasi JFP yang terintegrasi pada Pusbindiklatren-Bappenas.

Kata Kunci : Platform open source, Software Engineering , Techno-Economy, Project Management.

[1] LATAR BELAKANG

Sistem informasi Manajemen Jabatan Fungsional Perencana [SIM-JFP] Bappenas berbasis web dibuat berdasarkan kebutuhan bisnis dari Pusbindiklatren Bappenas. Berdasarkan pada **Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur**

Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, Bappenas telah ditetapkan sebagai Instansi Pembina Perencana. Sebagai Instansi Pembina Perencana, Pusbindiklatren-Bappenas harus melakukan pelayanan, melalui penyediaan data-data dan informasi yang diperlukan oleh Institusi Perencanaan, para perencana dan Kepala unit kerja lain yang melakukan kerjasama dengan Pusbindiklatren-Bappenas.

Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen JFP membantu Pusbindiklatren Bappenas dapat melaksanakan kegiatan administrasi dengan mudah, cepat, transparan, tertib, terpadu, produktif, akurat, aman, dan efisien, khususnya di dalam proses pengelolaan data diklat JFP mulai proses pendaftaran sampai dengan pembuatan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen.

Teknik pengumpulan dan penyajian data merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah Sistem Informasi. Dalam pencapaiannya perlu ada kerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini Pusbindiklatren Bappenas maupun instansi lain yang berhubungan dengan bidang Jabatan Fungsional perencana Seluruh Indonesia.

Pada pengembangannya, Sistem informasi Manajemen Jabatan Fungsional Perencana [SIM-JFP] Bappenas, ini akan menjadi sistem informasi terpadu internet yang tidak hanya dapat diakses secara intranet di dalam lingkungan Bappenas, dan instansi pemerintah terkait lainnya, tetapi juga dapat diakses dari luar menggunakan jaringan internet. Sehingga, Pengguna yang berkepentingan tetap dapat memantau perkembangan informasi Laporan Diklat JFP walaupun berada di luar lingkungannya.

[2] TINJAUAN TEORI

Tugas utama Pusbindiklatren adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas serta profesionalitas perencana pemerintah di seluruh Indonesia, dalam rangka meningkatkan kapasitas instansi perencanaan pemerintah di pusat dan daerah, sehingga kualitas output dari instansi perencanaan akan meningkat sesuai dengan harapan masyarakat.

Sedangkan fungsi Bappenas yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren adalah :

1. Sebagai Instansi Pembina Perencana
 - Menyusun Pedoman Pelaksanaan JFP
 - Melakukan Penilaian Angka Kredit bagi Perencana Utama

- Melakukan Penilaian Angka Kredit bagi Perencana Pertama, Muda dan Madya, apabila di tempatnya bekerja masih belum tersedia Tim Penilai
 - Menyusun Kurikulum Diklat Penjurangan Fungsional Perencana
 - Melaksanakan TOT bagi calon Pengajar Diklat Penjurangan Fungsional Perencana
 - Menyusun Standar Soal untuk Uji Kompetensi perencana
 - Melakukan kajian untuk JFP
 - Melakukan Akreditasi Kurikulum Diklat Substantif
 - Menjadi Pusat Data dan Informasi JFP
 - Melakukan Fasilitasi dan Sosialisasi JFP
 - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan JFP
2. Sebagai Instansi Penyelenggara Diklat Perencanaan
- Melakukan Kajian di Bidang Diklat Perencanaan
 - Penyelenggarakan Diklat Gelar dan Non Gelar bagi Perencana
 - Menyusun Kurikulum dan Penyelenggarakan Diklat Fungsional / Substantif
 - Melakukan Monitoring dan Evaluasi Diklat Perencanaan
 - Melaksanakan Sosialisasi dan Fasilitasi Diklat Perencanaan

PERATURAN-PERATURAN JFP

1. KEPMENPAN No. 16/Kep/M.PAN/3/2001: Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
2. SKB Ka Bappenas dan Ka BKN No. KEP.1106/Ka/08/2001 dan 34A Tahun 2001: Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
3. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.019/M.PPN/12/2001: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana
4. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.020/M.PPN/12/2001: Pedoman Penentuan Formasi Perencana
5. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.234/M.PPN/04/2002: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Perencana

6. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.235/M.PPN/04/2002: Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana
7. KEPMENPPN/Ka. Bappenas No.: KEP.266/M.PPN/04/2002 tentang Tata Kerja dan Organisasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana
8. KEPMENPPN/Ka Bappenas No.: KEP.011/M.PPN/02/2003 tentang Akreditasi dan Alih Kredit Program Diklat Substantif Perencana
9. KEPMENPPN/Ka Bappenas No.: KEP.012/M.PPN/02/2003 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Perencana
10. KEPPRES No. 41 Tahun 2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
11. KEP. Kepala BKN No. 32 Tahun 2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
12. SE DJA Depkeu No. SE-188/A/2003 tentang Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
13. Perpres No. 44/2007, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana;
14. SE DJP Depkeu No. SE-67/PB/2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
15. Permen PPN/Kepala Bappenas No. PER 006/M.PPN/09/2006 tentang perubahan atas Kepmen PPN/Ka Bappenas No. KEP.013/M.PPN/02/2003 tentang Penyelenggaraan DIKLAT Fungsional Penjurusan Perencana.

KETENTUAN UMUM

1. **PERENCANA:** PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di unit perencanaan, yaitu PNS yang bekerja di instansi/unit perencanaan pemerintah di pusat dan daerah.
2. **UNIT PERENCANAAN:** Unit pada Instansi pemerintah baik di pusat dan daerah yang berdasarkan Tupoksi, untuk:
 - a) Melakukan kegiatan perencanaan secara menyeluruh (dari identifikasi permasalahan, sampai penilaian hasil kegiatan)
 - b) Menghasilkan rencana kebijakan lingkup makro, sektor dan daerah serta berdampak nasional dan daerah
 - c) Melakukan pemantauan dan evaluasi
 - d) Instansi/Unit perencanaan di maksud:

Pusat: Bappenas atau Biro/Unit Perencanaan di Departemen/LPND

Daerah: Bappeda atau nama lain dan Unit Perencanaan di Dinas/SKPD

3. ANGKA KREDIT: Suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh Perencana dalam mengerjakan butir kegiatan sebagai salah satu syarat untuk Pengangkatan dan Kenaikan pangkat/jabatan dalam JFP.

JENJANG	PANGKAT, GOLONGAN RUANG	KREDIT KUM.
PERENCANA PERTAMA	1. PENATA MUDA, Golongan Ruang III/A; dan 2. PENATA MUDA TK. I, Golongan Ruang III/B	100 150
PERENCANA MUDA	1. PENATA, Golongan Ruang III/C; dan 2. PENATA TK. I, Golongan Ruang III/D	200 300
PERENCANA MADYA	1. PEMBINA, Golongan Ruang IV/A; 2. PEMBINA TK. I, Golongan Ruang IV/B; dan 3. PEMBINA UTAMA MUDA, Golongan Ruang IV/C	400 550 700
PERENCANA UTAMA	1. PEMBINA UTAMA MADYA, Gol. Ruang IV/D; dan 2. PEMBINA UTAMA, Golongan Ruang IV/E	850 1050

Gambar 2.1 : Jenjang Jabatan dan Pangkat

Tabel 2.1 : Syarat Pengangkatan dalam Jabatan JFP

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT	PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PERENCANA	PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN PERENCANA
[1] Seorang PNS yang telah melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan MENPAN No.16/KEP/M.PAN/3/2001 (tgl 19 Maret 2001) masih melaksanakan tugas perencanaan tersebut.	[1] Status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) [2] Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana [3] Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan	[1] Status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) [2] Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana [3] Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional

<p>[2] Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)</p> <p>[3] Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a</p> <p>[4] Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.</p>	<p>ruang III/a</p> <p>[4] <i>Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan</i></p> <p>[5] Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.</p>	<p><i>di bidang perencanaan</i></p> <p>[4] <i>Memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun</i></p> <p>[5] <i>Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya</i></p> <p>[6] Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.</p>
---	---	--

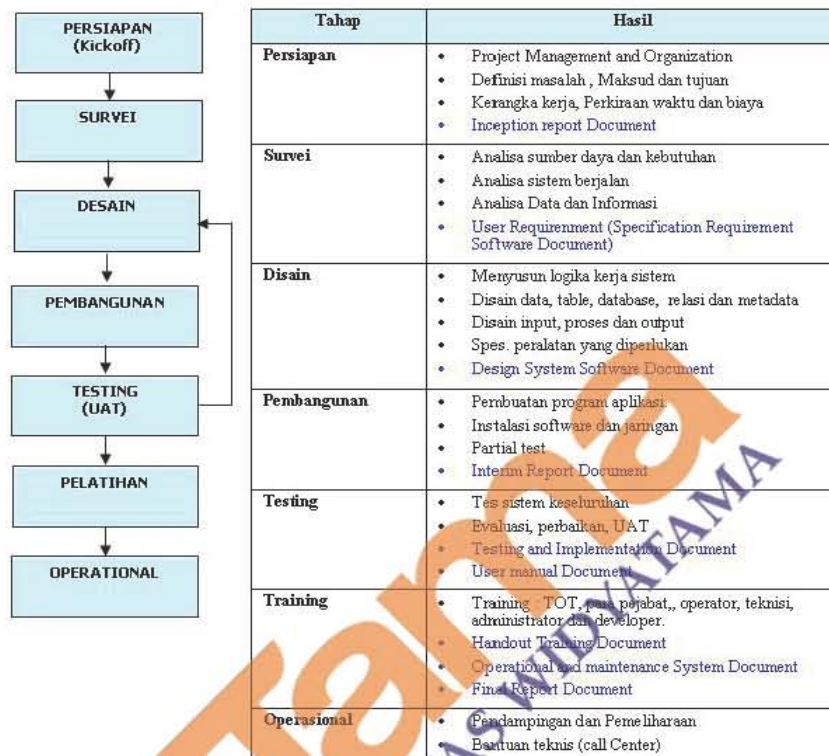
[3] METODOLOGI PENELITIAN

Bertitik tolak dari pemahaman terhadap ruang lingkup pekerjaan, maka metode pendekatan yang akan dilakukan sebagai upaya pembangunan Sistem Informasi adalah melakukan pendekatan dari sisi pemberdayaan data-data dibidang dokumentasi dan informasi kekayaan intelektual [*knowledge properties*].

Pemberdayaan data dilihat dari segi pelayanan informasi dan kebutuhan akan informasi itu sendiri. Melalui kajian yang mendalam terhadap kebutuhan pelayanan informasi dan faktor yang mempengaruhinya diharapkan dapat diidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi saat ini dan masa yang akan datang untuk Pembangunan Aplikasi di Bappenas.

Berdasarkan kajian tersebut, maka dapat disusun rencana tindak dan kerangka sistem. Pada prinsipnya, rencana tindak dan kerangka sistem merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan nilai dari konsep dan pembangunan sistem aplikasi di lingkungan Bappenas.. Untuk itu penajakan perluasan data dengan memasukan data-data terkait guna memperkuat informasi dibidang pengadaan harus dimasukan dalam kajian. Namun harus tetap memperhatikan keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang ada sehingga hasil akhir pekerjaan dapat langsung diterapkan.

Metode yang akan digunakan dalam pengerjaan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1 : Metodologi Penelitian

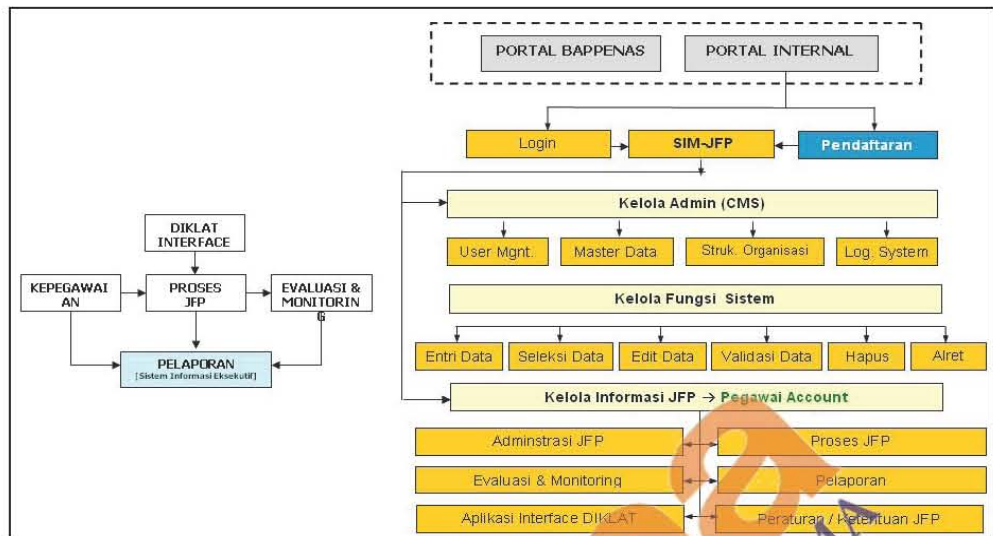
[4] PEMBAHASAN

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Jabatan Fungsional Perencana yang dikembangkan adalah web based system (Intranet dan internet), dimana aplikasi dan data terpusat di data center dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut :

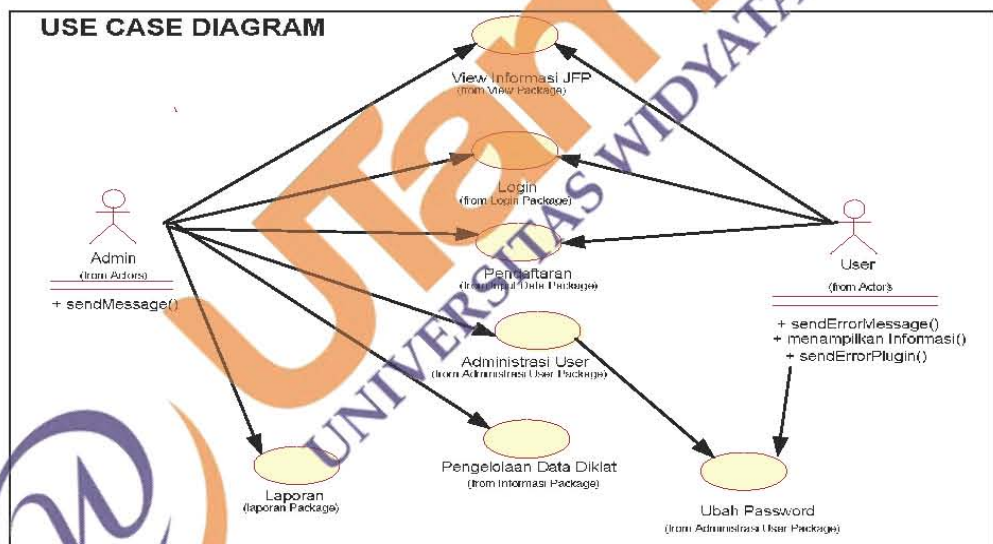
4.1 Arsitektur Sistem Aplikasi

Platform dasar dari aplikasi adalah Web Based System. Tujuan penggunaan web based system ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja & integritas data, karena seluruh klien dapat di-maintain pada satu titik, yaitu Web Server. Selain itu, sistem ini memungkinkan penggunaan yang luas, tanpa ada kebutuhan setting aplikasi di sisi klien dan sistem yang dibangun memenuhi tingkat otoritas pengguna (previlage Access).

Berikut adalah Site Map Arsitektur Aplikasi & database :



Gambar 4.1 : Site Map konfigurasi Aplikasi



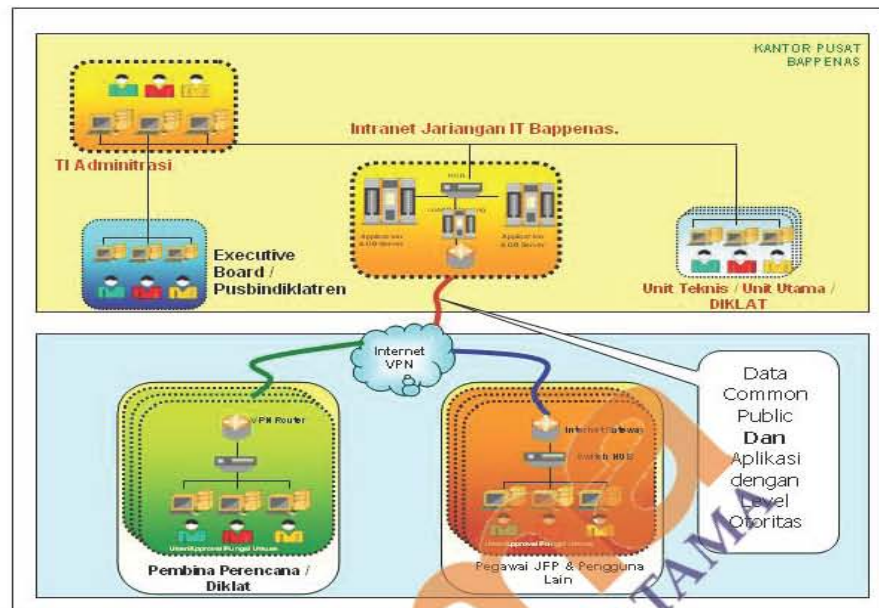
Gambar 4.2: Use Case SIM JFP

4.2 Arsitektur Infrastruktur

Prediksi / penjabakan sistem Infrastruktur dapat di gambarkan pada 3 bagian utama sebagai berikut :

1. Internet Data Center (IDC) yang akan mengoperasikan Public Access Network atau mengguna Private Akses Network.
2. Kantor Pusat Bappenas sebagai Corporate Server Center
3. Unit-unit dibawah Bappenas sebagai Corporate Server Local

Arsitektur infrastruktur dan aplikasi dijelaskan secara detil seperti pada Gambar 3.3



Gambar 4.3 : Arsitektur Infrastruktur dan Aplikasi

4.3 Platform Aplikasi SIM JFP

▪ Server Site

Perangkat lunak yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Windows/Linux Server sebagai Operating System (sesuai existing).
2. SQL-Server/MySQL/Postgre/Oracle Sebagai Database Server (sesuai existing).
3. Apache/IIS/Tomcat sebagai Web server

▪ Client Site

Perangkat lunak yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Windows 98/2000/XP atau Linux sebagai Operating System.
2. Microsoft Internet Explorer atau yang lainnya sebagai Web Browser.
3. OCR

▪ Development Tools

Perangkat lunak yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. PHP/Java/Ms.net.
2. HTML dilengkapi javascript atau vbscript.
3. Web 2 dengan teknologi Ajax, DOM.

4.4 Output Aplikasi SIM JFP

Sistem Informasi Manajemen Database Jabatan Fungsional Perencana adalah merupakan aplikasi yang dibuat untuk mempermudah Pusbindiklatren Bappenas dalam Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian data-data Diklat JFP dalam bentuk laporan Diklat Jabatan Fungsional Perencana.

Gambaran umum dari hasil pengembangan aplikasi ini dapat dilihat pada tampilan dibawah ini :



Gambar 4.4 : Tampilan Login



Gambar 4.5 : Tampilan Screen Menu Utama Sistem informasi Manajemen Jabatan Fungsional Perencana [SIM-JFP].



Gambar 4.6 : Tampilan Screen submenu Data Perencana

[5] KESIMPULAN

Keberhasilan penerapan Sistem Informasi Manajemen Jabatan Fungsional Perencana yang dibangun, diharapkan disertai kemampuan SDM dalam pengoperasian Sistem Informasi ini. Partisipasi unit kerja lain diharapkan dapat mendukung terlaksananya implementasi ini.

Sistem Informasi Manajemen Jabatan Fungsional Perencana ini berfungsi sebagai solusi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyusunan sistem dalam pengelolaan data-data laporan Diklat JFP. Dengan teknologi berbasis Web sistem ini dapat diakses dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja sesuai dengan kewenangan akses yang telah ditentukan.

[6] DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Database Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BAPPENAS. Tahun Anggaran 2009,
- [2] IEEE Std 830-1993, IEEE Recommended Practice for Software Requirement Specifications.
- [3] IEEE Std 610.12-1990 IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology (ANSI).
- [4] Literatur yang didapat selama Survei

[5] Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

